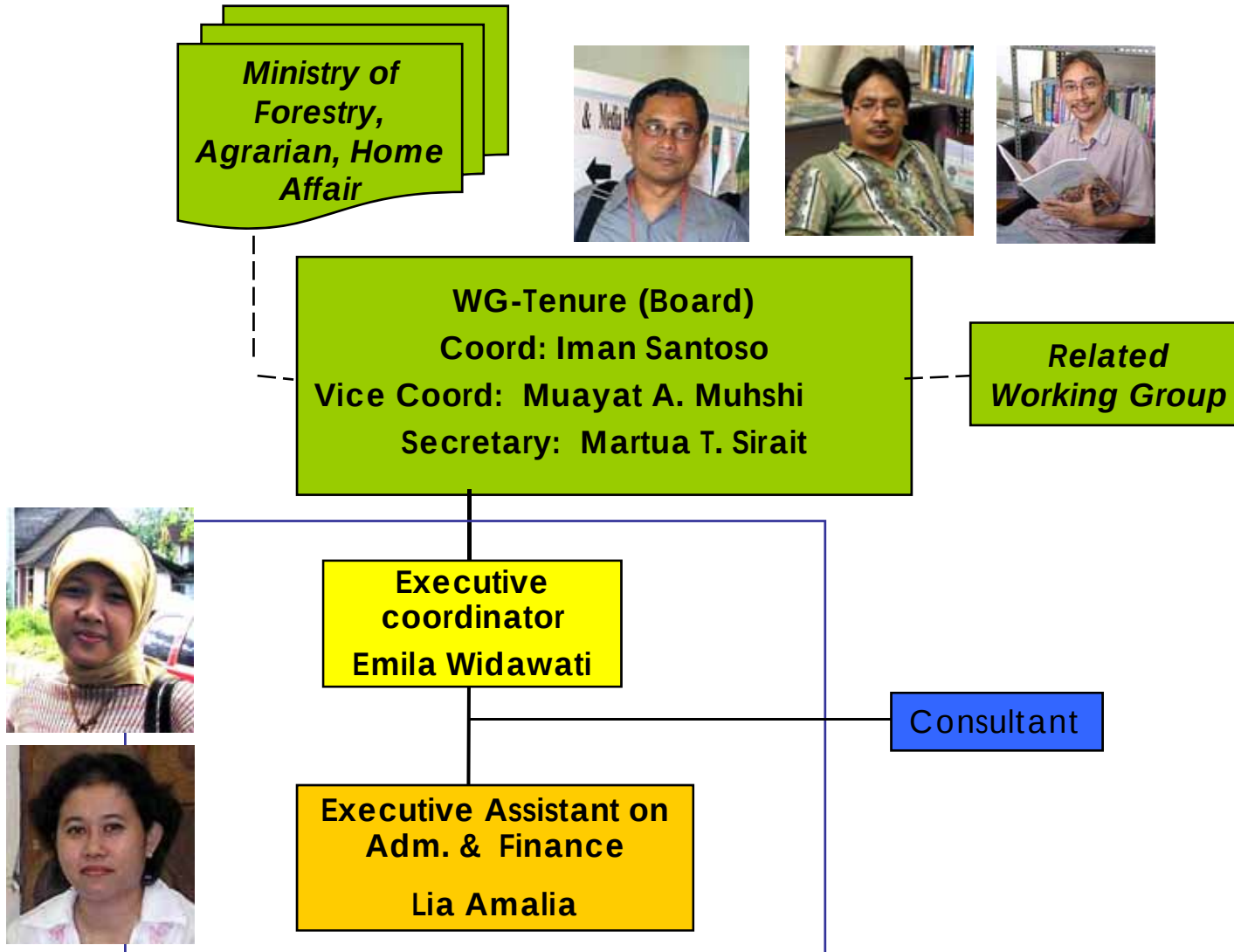


Kegiatan-Kegiatan WG-Tenure

Working Group on Forest Land Tenure (WG-Tenure) dibentuk pada Bulan November 2001 pada saat Workshop Konflik tenurial di kawasan hutan yang diadakan oleh Departemen Kehutanan dengan para mitra (NRM, DFID, ICRAF, dll).

1. Membentuk Badan Eksekutif WG-Tenure

WG-Tenure Structure



2. Roundtable discussion dengan 3 konstituen yang berbeda yaitu:

RTD-1 dengan konstituen Pemerintah yang diadakan pada tahun 2003.

Pendalaman kasus konflik masyarakat kasepuhan di TNGHS dan masyarakat Pekon Sukapura di Hutan Lindung Bukit Rigis register 45B Lampung Barat.

RTD-2 dgn konstituen Private sektor, Jan 2005 kerjasama dengan APHI

Desk study pengalaman PT. Finnantara Intiga deal dengan masyarakat dalam kawasan konsesi mereka merupakan tindak lanjut dr RTD ini.

RTD-3 dengan konstituen masyarakat sipil, Nov 2007 kerjasama dengan HuMA

RTD membahas persepsi masyarakat sipil terhadap masalah tenurial di kawasan hutan dan reforma agraria di kawasan hutan.



3. Proses pembelajaran penyelesaian masalah tenurial di 5 (lima) lokasi, yaitu:

A. Upaya penyelesaian masalah masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan lindung Reg 45B di Lampung Barat .



B. Mendorong pengakuan masyarakat kasepuhan di TNGHS oleh Perda. WG-Tenure bekerjasama dengan RMI, ICRAF, dan HuMA mendorong Pemda Kabupaten Lebak untuk menerbitkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Kasepuhan Cibedug dan Citorek di TNGHS.



C. Proses Tata Batas di TN Laiwanggi Wanggameti NTT.



D. Kajian sosial ekonomi masyarakat adat seko di Kab. Luwu Utara Sulawesi Selatan untuk pengembangan pemberdayaan. Kajian dilakukan oleh Bpk. Amran Ahmad (Universitas Hasanudin) dan Mahir Takaka (AMAN)



E. Mendorong Pengakuan Masyarakat Adat Nambluong di Kab. Jayapura

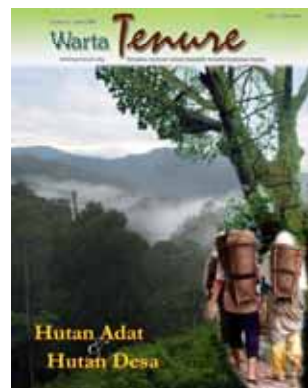
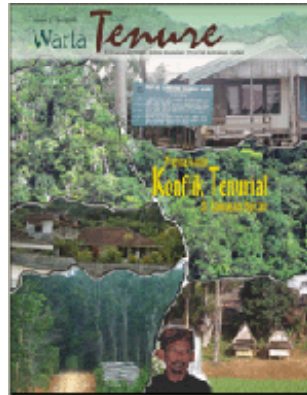
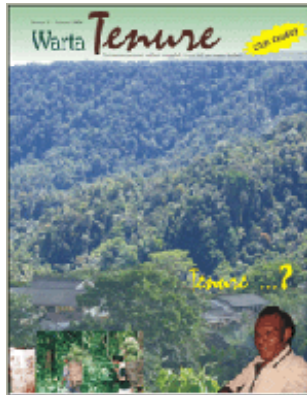


4. Mendorong dan mengawal proses kebijakan HTR dan Hutan Adat

- ❖ Drafting Naskah Akademis RPP Hutan Adat
- ❖ Masukan terhadap pemilihan lokasi HTR
- ❖ Aktif dalam pembahasan penyusunan Permenhut HTR

5. Pembangunan website www.wg-tenure.org

6. Secara berkala (4 bulan sekali) menerbitkan
WARTA TENURE



7. Membangun database

Beberapa data konflik yang bersumber dari instansi lain (a.l FWI, APHI) telah dikompilasi. Selain itu WG-Tenure sedang melakukan ujicoba implementasi Metode HuMAWIN pada beberapa wilayah konflik (dilaporkan kepada WGT) dengan harapan bentuk fasilitasi WGT dapat diberikan kepada para pihak dengan informasi akar konflik yang lebih baik. Data yang dikumpulkan adalah analisa spatial pada wilayah konflik yang ditindaklanjuti dengan data base dalam program Huma Win, kerja sama ini terselenggara atas kerjasama WGT, HuMa dan FWI

8. Seri Diskusi:

- ❖ Pilihan Hukum Masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Daya Hutan.
- ❖ Pembahasan RPP Hutan Adat **DRAF NASKAH AKADEMIS RPP HUTAN ADAT** .
- ❖ Diskusi pada sarasehan KMAN III kerjasama dengan HuMA dan LBBT
- ❖ Pembahasan PP No 3/2008 sebagai revisi dari PP No. 6/2007



- ❖ *Focus Group Discussion*
"Membedah Implementasi Skema-Skema Pemberdayaan Masyarakat dalam PP No 6/2007 di DIY dan Lampung."



- ❖ Bekerjasama dengan Tim Peduli Pengekahan Lampung Barat mengadakan diskusi "*Kasus tenurial dan pengusiran masyarakat adat marga belimbing di enclave pengekahan*".



- ❖ Support RMI dan Qbar dalam lokakarya hasil kajian RATA di Kawasan Halimun dan Nagari di Tanah Datar



9. Aktif dalam berbagai pertemuan yang diadakan oleh lembaga lain terkait isu-isu tenurial

10. Publikasi :

- ❖ Mendukung penerbitan buku yang ditulis oleh anggota (Lisman S)
- ❖ Menyusun Buku Potret Konflik dan inisiasi penyelesaian di beberapa kasus

